PENGARUH VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI INDONESIA PERIODE 1972 - 2017

Diajukan oleh
Wahyu Sigit Sanyoto
16911009

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2018

PENGARUH VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI INDONESIA PERIODE 1972 - 2017

Tesis S-2
Program Studi Magister Manajemen

Diajukan oleh
Wahyu Sigit Sanyoto
16911009

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2018

HALAMAN PENGESAHAN

Yogyakarta, _____

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing



Dr. Zaenal Arifin, M.Si.

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

WAHYU SIGIT SANYOTO

No. Mhs. : 16911009

Konsentrasi : Manajemen Keuangan

Dengan Judul:

PENGARUH VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI INDONESIA PERIODE 1972-2017

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I	Penguji II
Dr. Zaenal Arifin, M.Si.	Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana

Dr. Zainal Mustafa EQ., MM.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau pernah diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku"

Yogyakarta



Wahyu Sigit Sanyoto

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-Nya, sehingga tesis dengan judul "Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Di Indonesia Periode 1972 - 2017" ini dapat diselesaikan.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Manajemen pada Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Program Studi Magister Manajemen Universitas Islam Indonesia.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa syukur, rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala nikmat yang diberikan.
2. Nabi Muhammad SAW yang memberikan teladan kepada seluruh umatnya. termasuk penulis, yang mendorong penulis untuk selalu ingin menjadi orang yang lebih baik lagi.
3. Bapak Dr. Zaenal Arifin, M.Si. atas bimbingan, arahan dan waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk berdiskusi selama menjadi dosen pembimbing dan perkuliahan serta atas masukan dan saran pada saat seminar proposal dan seminar hasil tesis.
4. Dr. D. Agus Harjito, M.Si. yang telah memberikan masukan dan saran pada saat perkuliahan, seminar proposal dan seminar hasil tesis.
5. Direktur Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Program Studi Magister Manajemen Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Zainal Mustafa EQ., MM.
6. Seluruh Dosen dan Staff Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Program Studi Magister Manajemen Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menuntut ilmu selama ini.
7. Keluarga besar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I. Yogyakarta dan KPP Pratama Wonosari atas kesempatan dan dukungan yang diberikan untuk melanjutkan pendidikan.
8. Orang tua, istri, anak dan seluruh keluarga atas segala motivasi, perhatian dan doa nya.
9. Rekan rekan mahasiswa Magister Manajemen angkatan 47, khususnya Kelas C dan Kelas Konsentrasi Keuangan.
10. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar benar bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu manajemen.

Yogyakarta, Juli 2018

Wahyu Sigit Sanyoto

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
BERITA ACARA UJIAN TESIS v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR LAMPIRAN xii
ABSTRAK xiii
ABSTRACT xiv
BAB I : PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 6
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Manfaat Penelitian 7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian 7
1.6 Sistematika Penulisan 8
BAB II : KAJIAN PUSTAKA 9
2.1 Sistem Pajak 9
2.2 Pajak sebagai Sumber Utama Penerimaan Pemerintah 12
2.3 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak 14
2.4 Pengaruh Makroekonomi terhadap Penerimaan Pajak 15
2.4.1. Produk Domestik Bruto (PDB) 17
2.4.2. Inflasi 19
2.4.3. Nilai Tukar 20
2.4.4. Belanja Negara 21
2.4.5. Neraca Perdagangan 22
2.5. Kerangka Penelitian 23
BAB III: METODE PENELITIAN 24
3.1. Populasi dan Sampel 24
3.2. Jenis dan Sumber Data 24
3.3. Definisi Operasional Variabel Penelitian 25
3.4. Metode Analisis Data 26
3.4.1. Uji Asumsi Klasik 27
3.4.1.1. Uji Multikolinearitas 27

3.4.1.2. Uji Normalitas 28
3.4.1.3. Uji Heteroskesdastisitas 28
3.4.1.4. Uji Autokorelasi 29
3.4.2. Pengujian Regresi Linear Berganda 29
3.4.3. Pengujian Hipotesis 31
3.4.3.1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 31
3.4.3.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)..... 31
3.4.3.3. Pengujian Koefisien Determinasi (Adjusted R-squared). 32
BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 33
4.1. Analisis Statistik Deskriptif..... 33
4.2. Hasil Uji Asumsi Klasik..... 35
4.2.1. Uji Multikolinearitas..... 36
4.2.2. Uji Normalitas 38
4.2.3. Uji Heteroskesdastisitas..... 39
4.2.4. Uji Autokorelasi..... 39
4.3. Hasil Pengujian Hipotesis 40
4.4. Pembahasan Hasil Penelitian..... 44
4.4.1. Pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak 44
4.4.2. Pengaruh nilai tukar terhadap penerimaan pajak..... 46
4.4.3. Pengaruh neraca perdagangan terhadap penerimaan pajak 48
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN..... 51
5.1. Kesimpulan..... 51
5.2. Saran..... 52
DAFTAR PUSTAKA..... 54
LAMPIRAN..... 54

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Analisis Statistik Deskriptif 33
Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinearitas 36
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas 37
Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas 38
Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskesdastisitas 39
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi 40
Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Berganda 41

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Realisasi Penerimaan Perpajakan 2
Gambar II.1. Mekanisme Pengelolaan Uang Pajak melalui APBN..... 13
Gambar II.2. Kerangka Penelitian..... 23

DAFTAR LAMPIRAN

Data Penerimaan Pajak 57
Data Produk Domestik Bruto 58
Data Inflasi 59
Data Nilai Tukar 60
Data Belanja Negara 61
Data Neraca Perdagangan 62

ABSTRAK

Salah satu tujuan dari berdirinya Republik Indonesia adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Pada hakikatnya pajak merupakan sarana untuk menyejahterakan rakyat dan merupakan faktor penting bagi keuangan negara dalam menjamin kelangsungan pembangunan nasional. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, model perencanaan penerimaan pajak perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Pada penelitian ini akan diidentifikasi pengaruh variabel makroekonomi antara lain PDB, tingkat inflasi, nilai tukar, belanja negara, dan neraca perdagangan terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model regresi linier berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Variabel nilai tukar dan neraca perdagangan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Variabel PDB dan belanja negara dikeluarkan dari model persamaan regresi dikarenakan terjadi multikolinearitas.

Kata kunci : Makroekonomi, Penerimaan Pajak, Indonesia

ABSTRACT

The goals of the establishment of Republic of Indonesia is to realize a fair and prosperous society. Tax is a tool for public welfare and an important factor for goverment finances in ensuring the sustainability of national development. To optimize tax revenue, the tax revenue planning model needs to be developed taking into account the factors that may affect tax revenues. In this research will be identified the effect of macroeconomic variables such as GDP, inflation rate, exchange rate, state expenditure and net export to tax revenue in Indonesia. The method of analysis used in this research is to use multiple linear regression model with Ordinary Least Square (OLS) method. The result of the research shows that the inflation variable negatively affect the tax revenue. The exchange rate and net export variable have a positive effect on tax revenue. GDP and expenditure variables are excluded from the regression equation model due to multicollinearity.

Keywords : Macroeconomics, Tax Revenue, Indonesia

BAB I

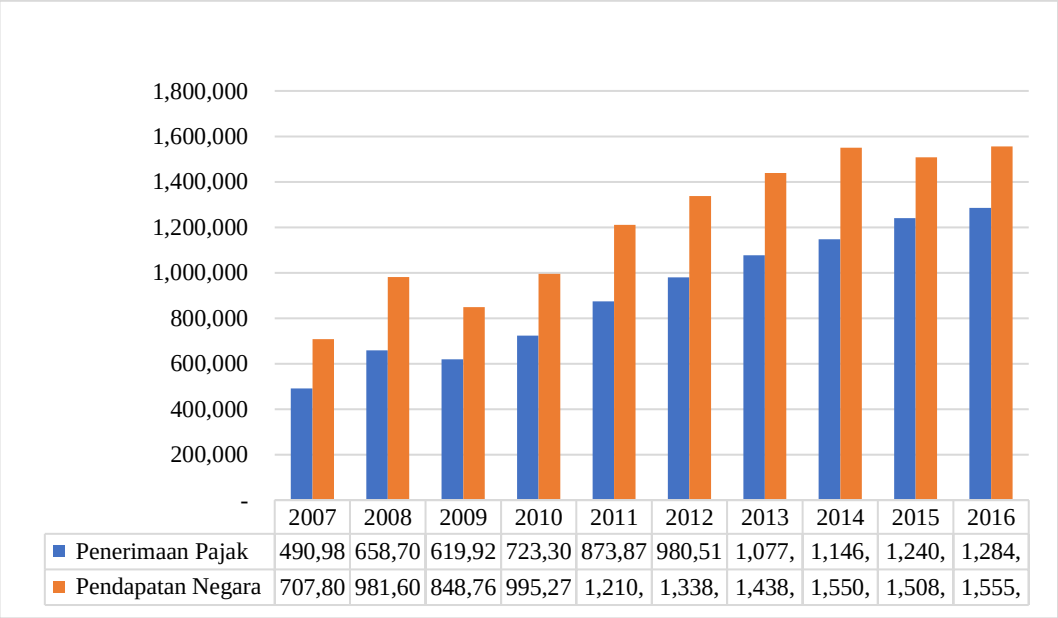
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan dari berdirinya Republik Indonesia adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Oleh karena itu, konsep negara kesejahteraan kerap disuarakan di panggung politik. Negara kesejahteraan yang dimaksudkan ialah suatu bentuk pemerintahan demokratis yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat, bahwa pemerintah harus mengatur pembagian kekayaan negara agar tidak ada rakyat yang kelaparan, tidak ada rakyat yang menemui ajalnya karena tidak memperoleh jaminan sosial (Latif, 2014).

Pada hakikatnya pajak merupakan sarana untuk menyejahterakan rakyat. Amanat kesejahteraan rakyat ini dapat direalisasikan manakala pemerintah mampu mengumpulkan pajak dari warga negara dan digunakan untuk membangun bangsa dan negara Indonesia. Pajak merupakan faktor penting bagi keuangan negara dalam menjamin kelangsungan pembangunan nasional. Sistem pajak yang efektif sebagai sumber pendapatan dalam negeri akan mampu menggerakkan roda pembangunan untuk dapat keluar dari ketergantungan terhadap bantuan asing dan sumber daya alam (Fjeldstad, 2013). Selama beberapa tahun terakhir, lebih dari 65% belanja negara Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak dan sisanya didanai dengan penerimaan non-pajak, hibah, serta hutang. Hal tersebut menunjukkan bahwa

penerimaan pajak memiliki peran yang strategis dalam mendanai belanja negara jika dibandingkan dengan sumber pendanaan lainnya.



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Penerimaan Pajak	490,98	658,70	619,92	723,30	873,87	980,51	1,077,	1,146,	1,240,	1,284,
Pendapatan Negara	707,80	981,60	848,76	995,27	1,210,	1,338,	1,438,	1,550,	1,508,	1,555,

Dalam Milyar Rupiah

Gambar I.1. Realisasi Penerimaan Perpajakan

Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, model perencanaan penerimaan pajak perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak (Wijayanti dan Firmansyah, 2017). Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara adalah kegiatan perekonomian dalam negara tersebut. Perekonomian suatu negara dibentuk berdasarkan persamaan identitas Y = C + I + G + (X – M). Dimana Y adalah produk domestik bruto (PDB), C adalah konsumsi, I adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor dan M adalah impor (Handoko, Aimon, dan Sofyan; 2014). Kenaikan konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah serta net ekspor akan menyebabkan kenaikan PDB yang pada akhirnya akan meningkatkan meningkatkan penerimaan pajak.

Inflasi juga mampu mempengaruhi penerimaan pajak dalam suatu negara. Saat terjadi inflasi, harga barang-barang secara umum naik yang akan memicu penurunan terhadap permintaan barang. Hal tersebut diikuti oleh perusahaan dengan mengurangi jumlah penawaran barang dengan mengurangi jumlah produksinya. Sehingga akan menyebabkan jumlah pendapatan perusahaan akan mengalami penurunan, demikian juga dengan pendapatan masyarakat karena terjadinya penurunan penggunaan faktor produksi tenaga kerja. Pada akhirnya hal ini akan menyebabkan penurunan pendapatan baik perusahaan maupun bagi masyarakat, sehingga penerimaan pajak akan berkurang (Kementerian Keuangan; 2013).

Tingkat inflasi dan nilai tukar dipandang sebagai variabel penting dalam menentukan tingkat perpajakan dan perubahan di dalamnya, di negara-negara berkembang. Kebijakan ekonomi di beberapa negara berkembang sering menunjukkan hubungan negatif antara penerimaan pajak suatu negara dan tingkat nilai tukar (Tanzi, 1989). Hubungan negatif tersebut merupakan efek langsung penguatan nilai tukar terhadap pajak ekspor. Jika mata uang domestik mengalami overvaluasi atau menguat, harga barang ekspor akan terlihat lebih tinggi di pasar luar negeri, sehingga permintaan barang tersebut akan berkurang. Hal tersebut akan menurunkan penerimaan pajak yang berasal dari pajak ekspor.

Dalam perekonomian, pengeluaran pemerintah merupakan instrumen kebijakan yang baik guna meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka panjang (Aggrey, 2011). Faktor – faktor produksi tidak hanya dibeli oleh sektor swasta saja, tetapi juga dibeli oleh sektor pemerintah. Pemerintah membelanjakan

pendapatannya untuk membeli output yang dihasilkan oleh perusahaan swasta. Selain itu pemerintah juga membelanjakan pendapatannya untuk membayar gaji pegawai negeri. Pemerintah untuk melakukan konsumsi dan pembayaran gaji memerlukan penerimaan yang diperoleh dari pajak atau hutang.

Perdagangan luar negeri juga mempunyai peranan penting dalam tercapainya penerimaan pajak. Hampir setiap negara pada saat ini tidak bisa mengabaikan interaksi ekonominya dengan luar negeri. Melalui kegiatan ekspor - impor, suatu negara dapat memperoleh barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Dengan perdagangan luar negeri, suatu negara mampu memperluas pasar industri-industri dalam negeri dan memungkinkan negara tersebut menggunakan teknologi modern untuk meningkatkan produktifitas (Sukirno, 2015). Neraca perdagangan adalah penerimaan devisa ekspor dikurangi pengeluaran devisa untuk impor (Boediono, 2016). Neraca perdagangan yang mengalami surplus mengindikasikan kegiatan perekonomian mengalami pertumbuhan, sehingga akan meningkatkan penghasilan masyarakat dan pada akhirnya akan mendorong naiknya penerimaan pajak.

Zhang dan Cui (2008) melakukan penelitian yang berfokus pada hubungan antara total pendapatan pajak, PDB, tingkat harga, dan perdagangan eksternal di China. Hasilnya menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara pendapatan pajak dan faktor makroekonomi di China, yang hasilnya dapat diterapkan untuk memperkirakan penerimaan pajak. Penelitian juga dilakukan oleh Yuksel, Orhan, dan Oztunc (2013) yang membahas tentang perilaku indikator makroekonomi utama dan interaksinya dengan penerimaan pajak di Turki. Hasil penelitian

menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara total penerimaan pajak terhadap investasi langsung asing dan hutang luar negeri. Selain itu, juga terdapat hubungan kointegrasi antara pendapatan pajak, PDB dan hutang luar negeri.

Handoko, Aimon, dan Sofyan (2014) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis dan menentukan pengaruh ekonomi, tingkat kemiskinan, kebijakan perpajakan (UU No.36 tahun 2008) terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ekonomi, tingkat kemiskinan, dan kebijakan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Wijayanti dan Firmansyah (2017) melakukan penelitian yang menganalisis pengaruh jangka panjang dan jangka pendek makroekonomi, seperti PDB, tingkat inflasi, nilai tukar dan belanja pemerintah untuk penerimaan pajak Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka panjang; PDB, nilai tukar, dan belanja pemerintah mempengaruhi penerimaan pajak Indonesia, kecuali tingkat inflasi. Dalam jangka pendek, penerimaan pajak Indonesia dipengaruhi oleh belanja pemerintah, sementara variabel lainnya tidak mempengaruhi penerimaan pajak Indonesia.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada keterbaruan data yang diteliti dan sumber data penelitian. Penelitian ini menggunakan data time series dari tahun 1972 sampai dengan tahun 2017 dengan sumber data berasal dari World Bank. Sehingga diharapkan hasil penelitian ini akan lebih mencerminkan dinamika perekonomian yang sedang terjadi saat ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka pada penelitian ini akan diidentifikasi bagaimanakah karakteristik perkembangan penerimaan pajak serta variabel makroekonomi yang diperkirakan menentukan penerimaan pajak, antara lain PDB, tingkat inflasi, nilai tukar, belanja negara dan neraca perdagangan. Pada penelitian ini juga dianalisis bagaimanakah pengaruh variabel makroekonomi tersebut terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat disusun pertanyaan penelitian berupa:

1. Bagaimanakah pengaruh PDB terhadap penerimaan pajak di Indonesia?
2. Bagaimanakah pengaruh tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak di Indonesia?
3. Bagaimanakah pengaruh nilai tukar Rupiah terhadap penerimaan pajak di Indonesia?
4. Bagaimanakah pengaruh belanja negara terhadap penerimaan pajak di Indonesia?
5. Bagaimanakah pengaruh neraca perdagangan terhadap penerimaan pajak di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Adanya rumusan masalah di atas adalah sebagai landasan dalam menentukan tujuan penelitian dalam tesis ini. Tujuan penelitian dalam tesis ini adalah untuk :

1. Mengetahui pengaruh PDB terhadap penerimaan pajak di Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak di Indonesia.

3. Mengetahui pengaruh nilai tukar Rupiah terhadap penerimaan pajak di Indonesia.
4. Mengetahui pengaruh belanja negara terhadap penerimaan pajak di Indonesia.
5. Mengetahui pengaruh neraca perdagangan terhadap penerimaan pajak di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para akademis yang mendalami bidang ekonomi dan perpajakan untuk mengetahui pengaruh variabel makroekonomi berupa PDB, inflasi, nilai tukar Rupiah, belanja negara, dan neraca perdagangan terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran atau masukan bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan dalam merumuskan atau menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan mencakup penerimaan pajak dan variabel makroekonomi berupa PDB, inflasi, nilai tukar Rupiah, belanja negara dan neraca perdagangan untuk tahun 1972 sampai dengan tahun 2017, sehingga akan dilihat bagaimana pengaruh variabel makroekonomi terhadap penerimaan pajak di Indonesia.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini disusun secara sistematika yang terdiri dari 5 (lima) bab agar diperoleh satu kesatuan uraian yang berkesinambungan mengenai tesis ini:

Bab I : Merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan

Bab II : Merupakan studi literatur tentang sistem pajak, pajak sebagai sumber utama penerimaan pemerintah, faktor–faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak, pengaruh makroekonomi terhadap penerimaan pajak dan studi-studi yang relavan dengan penelitian ini yang pernah dilakukan baik di Indonesia maupun di negara lain.

Bab III : Menguraikan tentang metodologi penelitian yang menjelaskan tentang metode *Ordinary Least Square* (OLS) dan pengujian-pengujian asumsi klasik yang biasa dilakukan untuk menguji suatu model regresi

Bab IV : Merupakan pembahasan dan analisis tentang hasil pengujian atas hipotesis-hipotesis awal

Bab V : Merupakan penutup, yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Sistem Pajak

Sejumlah ahli telah mengemukakan beberapa definisi mengenai pajak dari sudut pandang keilmuannya masing-masing :

- Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan berguna untuk pembiayaan pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Hartati, 2015).
- Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah (Tim Edukasi Perpajakan, 2016).
- Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016).

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian tersebut, ciri-ciri pajak yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain :

1. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak)
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah untuk menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak ada imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.
5. Berfungsi sebagai budgeter atau mengisi kas negara/anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif) (Hartati, 2015).

Ditinjau dari segi lembaga pemungutnya, pajak dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, yang terdiri atas: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Pertambangan, dan

Perhutanan (PBB Sektor P3) Pajak Ekspor, Bea Masuk dan Cukai. Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Pajak Daerah antara lain : Pajak Provinsi yang terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Tim Edukasi Perpajakan, 2016).

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

- *Official Assesment System,* yaitu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
- *Self Assestment System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
- *With Holding System,* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak (Hartati, 2015).

Pemerintah telah melaksanakan reformasi perpajakan pada tahun 1984, tahun 1994, tahun 2000 dan tahun 2005. Reformasi perpajakan di Indonesia pertama kali

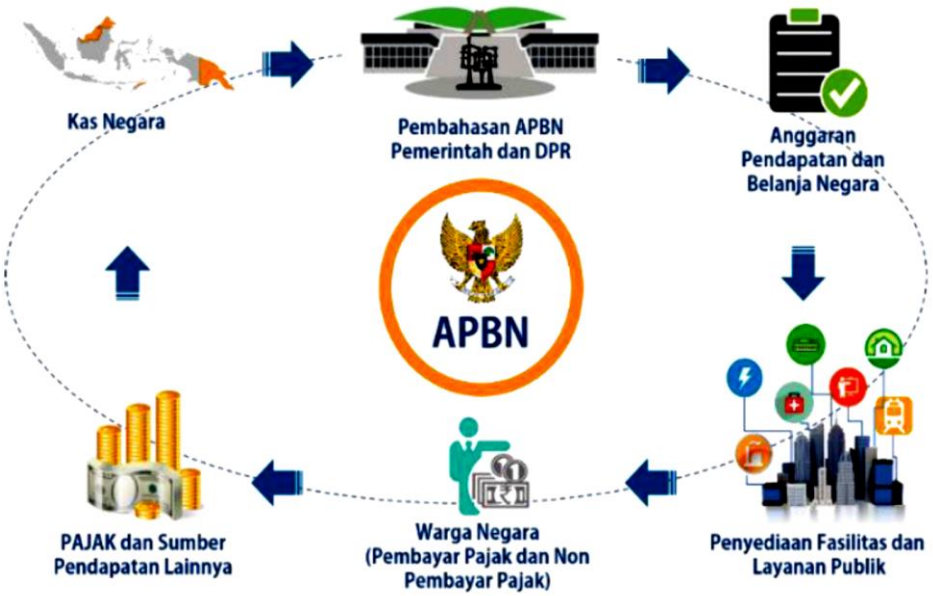
diluncurkan pada tahun 1983, dengan perombakan sistem perpajakan paling mendasar, yaitu digantikannya sistem *official assessment* menjadi *self assessment*. Pada tahun 1994, pemerintah merilis reformasi perpajakan kedua untuk merespon berkembangnya perekonomian nasional dan pengaruh globalisasi dunia yang semakin kuat. Pada tahun 2000, kembali pemerintah menyusun reformasi perpajakan, ditandai dengan pengundangan 5 (lima) undang-undang baru. Amandemen UU Perpajakan tahun 2005 menandai dilaksanakannya reformasi perpajakan keempat dengan tujuan untuk memperkuat upaya penerimaan pajak yang semakin menjadi tulang punggung dalam pembiayaan keuangan negara.

2.2. Pajak sebagai Sumber Utama Penerimaan Pemerintah

Pajak masih merupakan sumber keuangan Negara yang paling penting bagi semua negara di dunia (Boediono, 2016). Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018, anggaran pendapatan negara direncanakan sebesar Rp1.894,7 Triliun. Dari jumlah itu, penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp 1.618,1 Triliun, atau sebesar 85.4% dari total pendapatan negara. Penerimaan Perpajakan terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar 1.424 Triliun dan Penerimaan Bea dan Cukai sebesar 194,1 Triliun. Adapun sisanya disumbang oleh penerimaan negara bukan pajak (PNBP) direncanakan sebesar Rp 275,4 Triliun dan penerimaan hibah direncanakan sebesar sebesar Rp 1,2 Triliun. Peningkatan peran penerimaan perpajakan terhadap pendapatan negara merupakan sinyal positif karena berarti anggaran negara menjadi tidak tergantung (*less dependent*) terhadap PNBP yang

salah satunya adalah penerimaan sumber daya alam. Artinya, pendapatan negara tidak rentan terhadap gejolak harga komoditas sumber daya alam. Pendapatan negara yang didominasi penerimaan perpajakan berarti pula bahwa aktivitas ekonomi berjalan dengan baik (Tim Edukasi Perpajakan, 2016).

APBN dialokasikan untuk membiayai program pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Program pemerintah pusat dibiayai melalui skema Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) masing-masing Kementerian dan Lembaga Negara, sedangkan alokasi untuk Pemerintah Daerah, dijalankan melalui skema Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil. Selain itu, ada juga skema subsidi Pemerintah Pusat yang tujuannya untuk mengurangi beban masyarakat.



Gambar II.1. Mekanisme Pengelolaan Uang Pajak melalui APBN

2.3. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun faktor internal. Faktor eksternal yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, harga minyak internasional, produksi minyak mentah, harga minyak internasional, dan tingkat suku bunga. Sedangkan faktor internal yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah tarif pajak itu sendiri. (Wijayanti dan Budi, 2010). Faktor yang berpengaruh kepada penerimaan pajak adalah pendapatan per kapita, komposisi output sektoral, tingkat perdagangan internasional (*trade openess*), bantuan & hutang luar negeri, tingkat ekonomi informal, dan faktor institutional seperti korupsi & stabilitas politik (Gupta, 2007).

Faktor-faktor yang menentukan tingkat perpajakan di negara-negara berkembang ditentukan oleh 3 (tiga) faktor utama yaitu : pengaruh perekonomian, perilaku institusi dan sosial, dan pengaruh kebijakan pajak. Pengaruh perekonomian terdiri dari : tingkat pendapatan per kapita sebagai penggambaran untuk tingkat perkembangan ekonomi; tingkat urbanisasi; tingkat buta huruf; tingkat nilai uang dalam perekonomian; ekspor dan impor; kegiatan pertambangan dan agrikultur; dan ukuran negara. Faktor perilaku institusi dan sosial yang mempengaruki penerimaan pajak diantaranya : kualitas administrasi perpajakan; sumber daya untuk mengelola perpajakan; kejujuran pembayar pajak; tingkat korupsi pemungut pajak; besarnya denda atas ketidakpatuhan oleh pembayar pajak, korupsi oleh petugas pajak; distribusi pendapatan negara; sikap warga terhadap pemerintah, yang mungkin dipengaruhi oleh kualitas pelayanan publik; dan bentuk pemerintahan. Faktor

kebijakan pajak yang berpengaruh meliputi : penggunaan hasil pajak; jumlah jenis pajak dalam sistem perpajakan negara dan tingkat tarif pajak; dan penggunaan insentif pajak (Tanzi, 1989).

2.4. Pengaruh Makroekonomi terhadap Penerimaan Pajak

Ilmu ekonomi dipelajari karena mampu memberikan petunjuk mengenai kebijakan yang bisa diambil untuk menanggulangi suatu permasalahan ekonomi tertentu. Kebijakan makroekonomi pada dasarnya mencakup masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalian umum perekonomian (Boediono, 2016). Makroekonomi adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan, termasuk pertumbuhan pendapatan, perubahan harga dan tingkat pengangguran. Makroekonomi mampu menjelaskan peristiwa ekonomi dan bisa digunakan dalam penyusunan kebijakan untuk meningkatkan kinerja ekonomi (Mankiw, 2009). Dalam makroekonomi, perekonomian nasional merupakan suatu sistem yang terdiri dari empat pasar besar yang saling berhubungan satu sama lain yaitu :

a. Pasar barang
b. Pasar uang
c. Pasar tenaga kerja
d. Pasar luar negeri

Dalam makroekonomi terdapat orang-orang atau lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi yang digolongkan menjadi lima kelompok besar yaitu :

a. Rumah tangga
b. Produsen
c. Pemerintah
d. Lembaga keuangan
e. Negara-negara lain

Produk domestik bruto (PDB) sering dianggap sebagai ukuran terbaik untuk mengetahui seberapa baik kinerja perekonomian. Salah satu cara untuk menghitung PDB adalah melalui pendekatan pengeluaran. PDB dihitung dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh empat pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu: rumah tangga (*consumption*), pemerintah (*government*), pengeluaran investasi (*investment*), dan selisih antara nilai ekspor dikurangi impor ($X - M$). Secara sederhana, perekonomian suatu negara dibentuk berdasarkan persamaan identitas $Y = C + I + G + (X – M)$.

Kemampuan untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara berasal dari penghasilan yang diperoleh masyarakat di negara tersebut. Penghasilan masyarakat sangat mempengaruhi penerimaan pajak yang diperoleh suatu negara. Di Indonesia, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari

luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Secara umum, kondisi makroekonomi akan berpengaruh terhadap kegiatan perdagangan yang akan mempengaruhi tingkat pendapatan dan konsumsi oleh masyarakat dan pemerintah. Apabila terjadi kenaikan terhadap perekonomian maka penerimaan pajak juga akan mengalami kenaikan, sebab kenaikan perekonomian mengindikasikan bahwa produksi barang dan jasa telah meningkat. Peningkatan produksi barang dan jasa ini tentunya akan meningkatkan kegairahan ekonomi sehingga penerimaan pajak juga akan mengalami peningkatan. (Handoko, Aimon, dan Sofyan, 2014).

2.4.1. Produk Domestik Bruto (PDB)

PDB adalah nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang dalam suatu tahun tertentu dengan menggunakan faktor-faktor produksi milik warga negara tersebut dan milik penduduk negara-negara lain (Sukirno, 2015). PDB didefinisikan sebagai nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu (Mankiw, 2013). PDB pada hakikatnya merupakan ukuran sejauh mana perusahaan beroperasi dan mengeluarkan barang dan jasa. Semakin tinggi PDB semakin besar jumlah output yang diciptakan suatu negara dan semakin tinggi kapasitas barang modal yang digunakan perusahaan. Perubahan PDB mengindikasikan perubahan dalam pendapatan yang diterima masyarakat dan tingkat konsumsi masyarakat. Semakin tinggi pendapatan masyarakat menyebabkan penerimaan pajak akan bertambah karena ada perubahan jumlah pembayar pajak, dari yang tidak

dikategorikan sebagai pembayar pajak menjadi pembayar pajak, dan dari yang membayar pajak pada tarif tertentu menjadi naik sebagai pembayar pajak pada tarif yang lebih tinggi (tarif progresif). Semakin tinggi konsumsi masyarakat mengindikasikan peningkatan pendapatan masyarakat dan mengakibatkan peningkatan pendapatan dari pelaku usaha sehingga pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak.

Penelitian tentang pengaruh PDB terhadap penerimaan pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan Ghura (1998) menunjukkan bahwa peningkatan pada pendapatan dalam PDB akan menyebabkan peningkatan penerimaan pajak. Penelitian Karran (1985), Zhang dan Cui (2008), Yuksel, Orhan, dan Oztunc (2013) dan Mossie (2016) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki dampak yang kuat dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Penelitian Sinaga (2010) dan Wijayanti (2015) menunjukkan adanya pengaruh PDB terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Penelitian Muibi dan Sinbo (2013) menunjukkan pertumbuhan aktivitas ekonomi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di Nigeria. Penelitian Sookram dan Saridakis (2009) menunjukkan terdapat hubungan positif antara tingkat pendapatan dan rasio pajak. Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disusun dipotesis sebagai berikut :

H1 : PDB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

2.4.2. Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus (Boediono, 2016). Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian (Sukirno, 2015). Berdasarkan penyebabnya, inflasi digolongkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat (*demand inflation)*, dan inflasi yang timbul karena kenaikan ongkos produksi (*cost inflation*) (Boediono, 2016). Terjadinya inflasi yang tinggi akan mempengaruhi kegiatan perekonomian. Kenaikan harga mengakibatkan naiknya biaya produksi sehingga omset penjualan menurun dan investasi produktif akan berkurang. Ketika terjadi kenaikan harga, investor lebih suka menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi misalnya dengan membeli tanah, rumah dan bangunan sehingga mengakibatkan tingkat kegiatan ekonomi menurun. Kenaikan harga pada suatu negara juga menyebabkan barang-barang negara tersebut tidak dapat bersaing di pasaran internasional sehingga mengakibatkan ekspor menurun. Inflasi secara umum akan menyebabkan turunnya aktifitas ekonomi yang menurunkan penerimaan pajak.

Penelitian tentang pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan Ghura (1998), Samryn dan Mujtahid (2008) dan Sinaga (2010) menunjukkan bahwa inflasi mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak. Penelitian Richard dan Toly (2013) menunjukkan bahwa inflasi tidak berkorelasi signifikan terhadap tax revenue Indonesia. Penelitian Karran (1985), Sookram dan Saridakis (2009),

Muibi dan Sinbo (2013), Babyenda dan Klege (2014), menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disusun dipotesis sebagai berikut :

H2 : Inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak.

2.4.3. Nilai Tukar

Kurs valuta asing (nilai tukar) adalah perbandingan nilai mata uang asing dengan nilai mata uang domestik. Kurs ini akan menunjukkan banyaknya uang dalam negeri yang diperlukan untuk membeli satu unit valuta asing tertentu (Sukirno, 2015). Nilai tukar mata adalah harga dari mata uang yang digunakan oleh penduduk negara tertentu untuk saling melakukan perdagangan dengan negara lainnya (Mankiw, 2013). Ketika nilai tukar mengalami depresiasi maka harga barang dalam negeri cenderung meningkat dan akan mempengaruhi konsumsi masyarakat. Menurunnya nilai tukar mata uang suatu negara akan berdampak pada perusahaan dalam negeri yang dalam kegiatan usahanya melibatkan kegiatan ekspor impor yang akan mengakibatkan harga jual akhir yang ditawarkan kepada konsumen akan semakin tinggi sehingga daya beli konsumen akan turun. Peningkatan atau penurunan penghasilan wajib pajak akibat fluktuasi kurs mata uang akan mempengaruhi penerimaan pajak pemerintah.

Penelitian tentang pengaruh nilai tukar terhadap penerimaan pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan Sinaga (2010), Samryn dan Mujtahid (2008) dan Muibi dan Sinbo (2013) menunjukkan bahwa nilai tukar mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak. Penelitian Basirat,

Aboodi, dan Ahangari (2014) menunjukkan bahwa nilai tukar perpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disusun dipotesis sebagai berikut :

H3 : Nilai Tukar berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

2.4.4. Belanja Negara

Kebijakan fiskal memegang peranan penting dalam menstabilkan kegiatan ekonomi dan menciptakan kegiatan ekonomi ke arah tingkat yang dikehendaki (Sukirno, 2015). Kebijakan fiskal adalah kebijakan makro yang dilaksanakan lewat APBN (Boediono, 2016). Belanja negara merupakan bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Anggaran dari pemerintah diharapkan akan menciptakan *multiplier effect* pada sektor-sektor ekonomi lainnya. *Multiplier effect* pengeluaran pemerintah akan semakin besar jika asumsi bahwa belanja pemerintah digunakan untuk kegiatan produktif dapat terpenuhi. Penelitian yang dilakukan Aggrey (2011) dan Taha dan Loganathan (2008) menunjukkan bahwa belanja negara mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak. Penelitian yang dilakukan Ghura (1998) menunjukkan bahwa belanja negara perpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disusun dipotesis sebagai berikut :

H4 : Belanja Negara berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

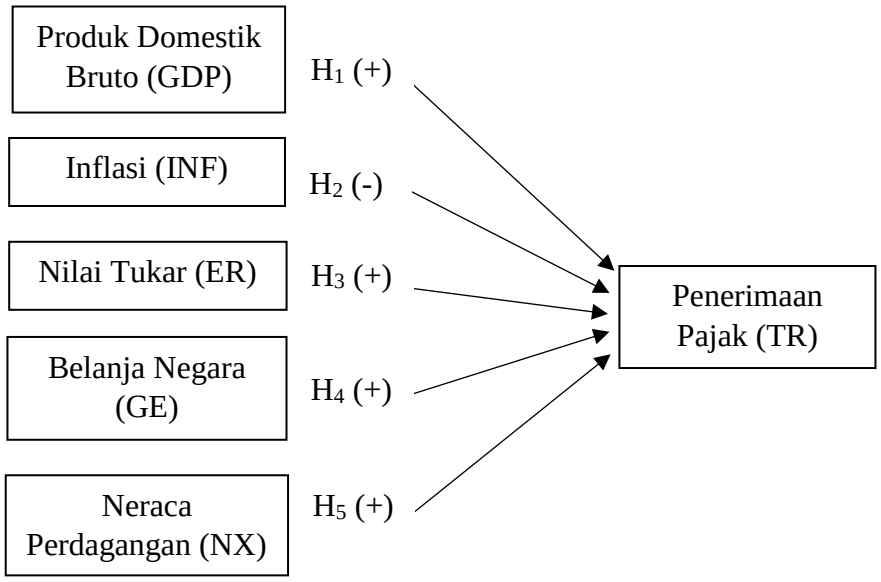
2.4.5. Neraca Perdagangan

Neraca perdagangan adalah penerimaan devisa ekspor dikurangi pengeluaran devisa untuk impor (Boediono, 2016). Ekspor adalah berbagai macam barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri lalu dijual di luar negeri (Mankiw, 2013). Ekspor adalah pengiriman dan penjualan barang-barang dalam negeri ke negara-negara lain yang pada akhirnya akan menyebabkan peningkatan pendapatan nasional. Sedangkan impor merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam suatu perekonomian yang pada akhirnya akan mepengaruhi pendapatan nasional (Sukirno, 2015). Neraca perdagangan yang mengalami peningkatan atau surplus menunjukkan bahwa produksi barang dan jasa juga mengalami peningkatan. Peningkatan produksi barang dan jasa ini akan menyebabkan peningkatan terhadap perekonomian yang muaranya akan meningkatkan penerimaan pajak. Neraca perdagangan yang mengalami defisit akan mengganggu perekonomian dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Defisit akan menyebabkan nilai tukar Rupiah akan semakin melemah dan kemudian akan menghambat kinerja industri dan mengurangi kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dalam negeri yang menurun mengurangi kegairahan pengusaha-pengusaha untuk melakukan penanaman modal dan membangun kegiatan usaha baru. Penelitian yang dilakukan oleh Handoko, Aimon, dan Sofyan (2014) menyatakan bahwa neraca perdagangan memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap perekonomian di Indonesia yang pada akhirnya akan mempengaruhi penerimaan pajak di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disusun dipotesis sebagai berikut :

H5 : Neraca perdagangan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

2.5. Kerangka Penelitian

Pada penelitian ini, analisis yang mempengaruhi penerimaan pajak dilakukan dengan menggunakan beberapa variabel ekonomi makro berupa PDB, tingkat inflasi, nilai tukar, belanja negara, ekspor dan impor sehingga dapat digambarkan kerangka penelitian sebagai berikut :



Gambar II.2. Kerangka Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah data penerimaan pajak dan data makroekonomi Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*, yaitu sampel yang ditarik dengan menggunakan kriteria tertentu. Kriteria pemilihan sampel yang akan diteliti adalah:

1. Data penerimaan pajak dan data makroekonomi Indonesia (tahunan) selama periode pengamatan tahun 1972 sampai dengan tahun 2017.
2. Data penelitian tersedia lengkap dan telah dipublikasikan secara resmi oleh lembaga atau instansi terkait.

Berdasarkan pada kriteria pengambilan sampel seperti yang telah disebutkan di atas, maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 46 sampel (tahun 1972 sampai dengan tahun 2017).

3.2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dan merupakan data runtun waktu (*time series*). Data yang diteliti adalah data tahun 1972 sampai dengan tahun 2017. Data penerimaan pajak, produk domestik bruto, inflasi, nilai tukar rupiah, belanja negara, neraca perdagangan (ekspor dan impor) yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data World Bank.

3.3. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, variabel terikat adalah Penerimaan Pajak (PP). Data penerimaan pajak merupakan data pembayaran pajak dari masyarakat yang diterima oleh pemerintah untuk keperluan publik. Data bersumber dari World Bank dan disajikan dalam satuan triliun Rupiah. Variabel-variabel bebas yang akan diuji dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Produk domestik bruto (PDB)

PDB adalah jumlah nilai bruto yang dihasilkan oleh semua produsen dan penduduk dalam perekonomian ditambah pajak dan dikurangi subsidi yang tidak termasuk dalam nilai produk. Data bersumber dari World Bank dan dalam satuan triliun Rupiah.

PDB = nilai PDB Indonesia pada tahun ke-t

2. Inflasi (INF)

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum, yaitu barang dan jasa yang termasuk kebutuhan pokok masyarakat. Data diperoleh dari World Bank dan disajikan dalam satuan persen (%).

INF = nilai inflasi Indonesia pada tahun ke-t

3. Nilai tukar Rupiah (ER)

Nilai tukar resmi mengacu pada nilai tukar yang ditentukan oleh otoritas nasional atau tingkat yang ditentukan di pasar valas yang disetujui secara hukum. Nilai tukar dihitung sebagai rata-rata tahunan berdasarkan rata-rata bulanan (nilai mata uang lokal relatif terhadap dolar AS). Data diperoleh dari World Bank.

ER = nilai tukar Rupiah pada tahun ke-t

4. Belanja Negara (GE)

Belanja negara merupakan semua belanja pemerintah untuk pembelian barang dan jasa (termasuk gaji pegawai) Data diperoleh dari World Bank dan disajikan dalam satuan triliun Rupiah.

GE = jumlah belanja negara Indonesia pada tahun ke-t

5. Neraca perdagangan (NX)

Neraca perdagangan dalam penelitian ini menunjukkan selisih nilai ekspor dikurangai nilai impor. Ekspor menunjukkan data penjualan barang dari Indonesia ke luar negeri sedangkan impor menunjukkan data barang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Data diperoleh dari World Bank dan disajikan dalam satuan triliun Rupiah.

NX = nilai neraca perdagangan Indonesia pada tahun ke-t

3.4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model ekonometrika berupa model regresi linier berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Regresi linear berganda adalah persamaan regresi dimana terdapat lebih dari satu variabel penjelas atau variabel bebas, yang mempengaruhi variabel tak bebas dan merupakan hubungan sebab akibat. Dalam hal regresi, metode yang popular dan paling sering digunakan adalah metode kuadrat terkecil biasa (*Ordinary Least Squares*, OLS) untuk menduga koefisien regresi dari model.

3.4.1. Uji Asumsi Klasik

Asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Syarat-syarat tersebut apabila dipenuhi semuanya, maka model regresi linear tersebut dikatakan BLUE (*Best Linear Unbiased Estimation)*. Uji asumsi klasik yang dilakukan sebagai berikut :

3.4.1.1. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya hubungan linier sempurna atau tepat, di antara beberapa atau semua variabel dalam sebuah model regresi berganda. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel–variabel ini disebut tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang mempunyai nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol.

Multikolinearitas dapat dilihar dengan melakukan analisis terhadap matriks korelasi variabel-variabel bebas. Jika antar variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,80), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel bebas tidak berarti bebas dari multikolinieritas. Multikolinieritas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel bebas. Multikolinearitas juga dapat dilihat dari besarnya nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). *Tolerance* mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh

variabel bebas lainnya. Jika nilai tolerance ≤ 0,1 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 maka dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

3.4.1.2. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan Uji Jarque Bera (JB). Uji Jarque Bera adalah salah satu uji normalitas jenis *goodness of fit* test yang mana mengukur apakah skewness dan kurtosis sampel sesuai dengan distribusi normal. Uji ini didasarkan pada kenyataan bahwa nilai skewness dan kurtosis dari distribusi normal sama dengan nol. Oleh karena itu, nilai absolut dari parameter ini bisa menjadi ukuran penyimpangan distribusi dari normal. Dalam aplikasinya nilai Jarque Bera (JB) dibandingkan dengan nilai Chi-Square Tabel. Jika nilai JB lebih kecil dari nilai Chi Square maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian terdistribusi normal.

3.4.1.3. Uji Heteroskesdastisitas

Uji heteroskesdastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap (homoskedastisitas) atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji glejser. Berdasarkan uji glejser, jika variabel bebas signifikan secara statistik mempengaruhi variabel terikat maka terdapat indikasi terjadi heteroskedastisitas. Jika nilai p value lebih besar daripada nilai signifikansi yang dipakai yaitu 0,05

maka dapat dinyatakan model regresi bersifat homoskedastisitas atau dengan kata lain tidak ada masalah heteroskedastisitas.

3.4.1.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Penelitian menggunaan data time series tidak lepas dari permasalahan autokorelasi. Bentuk lain dari autokorelasi yaitu stasioneritas karena adanya autokorelasi mengakibatkan data menjadi tidak stasioner. Dalam penelitian ini uji stasioneritas yang dilakukan menggunakan correlogram dari Q-stat pada model. Pada dasarnya korelogram merupakan teknik identifikasi stasioner data time series melalui fungsi autokorelasi(ACF).

Dalam penelitian ini digunakan metode koreksi autokorelasi *Newey-West* untuk mengatasi masalah autokorelasi tersebut. Dengan metode ini, dilakukan koreksi standard error untuk mengatasi masalah autokorelasi. Metode ini mampu mengoreksi masalah autokorelasi dan heteroskedastisitas sekaligus. Hasil koreksi standard error dengan metode *Newey West* bisa juga digunakan sebagai hasil penelitian. Standard error yang telah dikoreksi disebut sebagai HAC (*heteroscedasticity and autocollelation – consistent*) *standard errors* atau *Newey-West standard errors*.

3.4.2. Pengujian Regresi Linear Berganda

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel

penjelas/bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Analisis ini untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan, antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif.

Regresi linear berganda dilakukan untuk menganalisis dan menguji pengaruh faktor makro ekonomi berupa produk domestik bruto, inflasi, nilai tukar Rupiah, ekspor dan impor terhadap penerimaan pajak dengan rumus:

$$PP_t = a + b_1PDB_t + b_2INF_t + b_3ER_t + b_4GE_t + b_5NX_t + e$$

Keterangan :

PP_t = Penerimaan Pajak pada tahun ke-t

a = Konstanta

b_1, b_2, b_3, b_4, b_5 = Koefisien regresi yang menunjukkan perubahan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen

PDB = Produk Domestik Bruto

INF = Inflasi pada tahun ke-t

ER = nilai tukar Rupiah pada tahun ke-t

GE = nilai Pengeluaran Pemerintah pada tahun ke-t

NX = nilai Neraca Perdagangan pada tahun ke-t

e = *Error*

3.4.3. Pengujian Hipotesis

Selain pengujian regresi linier berganda, dalam penelitian ini dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut :

3.4.3.1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial atau individu untuk menyatakan menerima atau menolak hipotesis yang telah disusun. Aturan pengambilan keputusan dalam pengujian hipotesis, yaitu :

1. Jika t hitung > t tabel atau nilai sign. < *alpha* maka H_0 ditolak dan H_1 diterima dengan kata lain terdapat pengaruh variabel bebas tertentu terhadap variabel terikat.
2. Jika t hitung < t tabel atau nilai sign. > *alpha* maka H_0 diterima dan H_1 ditolak dengan kata lain tidak terdapat pengaruh variabel independen tertentu terhadap variabel dependen.

Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan dengan nilai signifikansi sebesar 0,05. Jika signifikansi lebih besar dari 0,05 maka variabel bebas secara individu tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Jika signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka variabel bebas secara individu memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.

3.4.3.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Hipotesa yang digunakan adalah:

H_0 = Semua variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap

variabel tidak bebasnya

H_1 = Semua variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel tidak bebasnya

Pengujian uji statistik F dalam aplikasi eviews dilihat dari nilai F-statistics. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan dengan nilai signifikansi sebesar 0,05. Jika nilai F-statistics lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima yang berarti variabel bebas secara individu tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Jika nilai F-statistics lebih kecil dari 0,05 maka H_1 diterima yang berarti variabel bebas secara individu memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.

3.4.3.3. Pengujian Koefisien Determinasi (Adjusted R-squared)

Uji Koefisien determinasi merupakan uji untuk mengetahui berapa besar pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Output uji koefisien determinasi dapat dilihat pada R-squared dan Adjusted R-squared. Penggunaan Adjusted R-squared dilakukan apabila dalam penelitian model regresi mengalami modifikasi seperti penambahan dan/atau pengurangan variabel bebas (dengan asumsi yang tepat seperti apabila terjadi masalah multikolinearitas dalam model regresi). Koefisien determinasi bernilai antara nol dan satu. Nilai Adjusted R-squared yang kecil dapat diartikan bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat sangat terbatas. Nilai Adjusted R-squared yang mendekati satu dapat diartikan bahwa variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel yang diambil. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data runtun waktu (*time series*) antara tahun 1972 sampai dengan tahun 2017. Hasil dari analisis statistik deskriptif adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Analisis Statistik Deskriptif

	Minimum	Maximum	Mean	Std Deviation	Keterangan
PP	0,57	1.495,89	290,85	419,50	Triliun Rupiah
PDB	4,86	13.588,80	2.591,46	3.870,75	Triliun Rupiah
INF	3,53	58,39	11,30	9,97	Persen
ER	415,00	13.389,41	5.078,32	4.581,95	Rupiah
GEX	0,41	1.259,60	229,44	364,15	Triliun Rupiah
NX	-1,41	2,28	0,93	1,08	Triliun Rupiah
n = 46					

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa variabel PP (Penerimaan Pajak) mempunyai nilai minimum 0,57 dan nilai maksimum sebesar 1.495,89 dalam satuan triliun rupiah. Semakin besar nilai penerimaan pajak menunjukkan semakin banyak nilai penerimaan pajak yang diterima pemerintah. Rata-rata penerimaan pajak sejumlah 290,85 triliun dan standar deviasi sejumlah 419,50. Nilai standar deviasi lebih tinggi daripada rata-rata sehingga dapat dinyatakan bahwa data penerimaan pajak cenderung lebih bervariasi (heterogen).

Hasil analisis statistik deskriptif dari variabel PDB (Produk Domestik Bruto) dalam tabel 4.1 menunjukkan bahwa nilai minimum PDB sebesar 4,86 dan nilai maksimum PDB sebesar 13.588,80 dalam satuan triliun rupiah. Semakin besar nilai PDB menunjukkan semakin banyak barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat Indonesia. Rata-rata PDB sejumlah 2.591,46 triliun dan standar deviasi sejumlah 3.870,75. Nilai standar deviasi lebih tinggi daripada rata-rata sehingga dapat dinyatakan bahwa data PDB cenderung lebih bervariasi (heterogen).

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa variabel INF (Inflasi) mempunyai nilai minimum 3,53 dan nilai maksimum sebesar 58,39 dalam satuan persen (%). Semakin besar nilai inflasi menunjukkan kecenderungan kenaikan harga dalam perekonomian suatu negara semakin tinggi. Rata-rata inflasi sejumlah 11,30 persen dan standar deviasi sejumlah 9,97. Nilai standar deviasi lebih rendah daripada rata-rata sehingga dapat dinyatakan bahwa data inflasi cenderung kurang bervariasi (homogen).

Hasil analisis deskriptif dari variabel ER (Nilai Tukar) dalam tabel 4.1 menunjukkan bahwa nilai minimum ER sebesar 415,00 dan nilai maksimum ER sebesar 13.389,41 dalam satuan rupiah. Semakin besar nilai ER dalam penelitian ini menunjukkan semakin banyaknya nilai rupiah yang diperlukan untuk membeli 1 (satu) $ USD (Dollar Amerika) . Rata-rata nilai tukar sejumlah 5.078,32 rupiah dan standar deviasi sejumlah 4.581,95. Nilai standar deviasi lebih rendah daripada rata-rata sehingga dapat dinyatakan bahwa data nilai tukar cenderung kurang bervariasi (homogen).

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa variabel GEX (Belanja Pemerintah) mempunyai nilai minimum 0,41 dan nilai maksimum sebesar 1.259,60 dalam satuan triliun rupiah. Semakin besar nilai belanja pemerintah menunjukkan semakin besarnya nilai belanja yang dilakukan pemerintah Indonesia. Rata-rata belanja pemerintah sejumlah 229,44 triliun dan standar deviasi sejumlah 364,15. Nilai standar deviasi lebih tinggi daripada rata-rata sehingga dapat dinyatakan bahwa data belanja pemerintah cenderung lebih bervariasi (heterogen).

Hasil analisis statistik deskriptif dalam tabel 4.1 menunjukan bahwa variabel NX (Neraca Perdagangan) mempunyai nilai minimum sebesar -1,41 dan nilai maksimum sebesar 2,28 dalam satuan triliun rupiah. Semakin besar nilai neraca perdagangan menunjukkan bahwa nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor. Sebaliknya, semakin kecil nilai neraca perdagangan menunjukkan semakin besarnya nilai impor daripada nilai ekspor. Rata-rata neraca perdagangan sejumlah 0,93 triliun dan standar deviasi sejumlah 1,08. Nilai standar deviasi lebih tinggi daripada rata-rata sehingga dapat dinyatakan bahwa data neraca perdagangan cenderung lebih bervariasi (heterogen).

4.2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model ekonometrika berupa model regresi linier berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Syarat-syarat tersebut apabila dipenuhi semuanya, maka

model regresi linear tersebut dikatakan BLUE (*Best Linear Unbiased Estimation).* Hasil uji asumsi klasik ditunjukkan sebagai berikut :

4.2.1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen. Pengujian dilakukan dengan memperhatikan nilai Variance Inflation Factors (VIF). Gejala multikolinearitas terjadi jika nilai VIF lebih besar dari 10. Jika nilai VIF tinggi maka nilai koefisien regresi tidak dapat ditentukan dengan tepat.

Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	41.89992	4.083937	NA
GDP	0.000557	1159.795	795.3671
INF	0.138465	3.036858	1.312327
ER	8.635533	38.99335	17.28659
GE	0.054480	968.3954	688.8440
NX	61.02612	11.97970	6.822826

Dari tabel 4.2 diketahui bahwa terdapat variabel yang mempunyai nilai multikolinearitas sangat tinggi diatas 10 sehingga disimpulkan terjadi multikolinearitas dalam variabel-variabel terebut. Untuk mengatasi masalah terebut, persamaan regresi perlu disesuaikan agar mendapatkan persamaan regresi yang baik dan tidak terjadi multikolinearitas. Penyesuaian dilakukan dengan cara mengeluarkan variabel GDP dan GE dari model regresi.

Dalam penelitian ini digunakan model persamaan regresi dalam bentuk logaritma natural (Semi Log). Bentuk logaritma natural dilakukan dengan

melakukan transformasi data pada variabel PP menggunakan transformasi Log. Transformasi data dilakukan dengan tujuan untuk mengubah skala pengukuran data asli menjadi bentuk lain sehingga data dapat memenuhi uji asumsi klasik. Sehingga dapat diketahui bahwa model terbaik untuk melihat pengaruh variabel makro ekonomi terhadap total penerimaan pajak adalah :

$$Log(PP)_t = a + b_1 INF_t + b_2 ER_t + b_3 Log(NX)_t + e$$

Dari persamaan tersebut, dilakukan uji multikolinearitas untuk melihat apakah ada keterkaitan yang sempurna antara variabel-variabel independen. Pengujian dilakukan dengan memperhatikan nilai VIF dengan hasil ditunjukkan sebagai berikut :

Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas

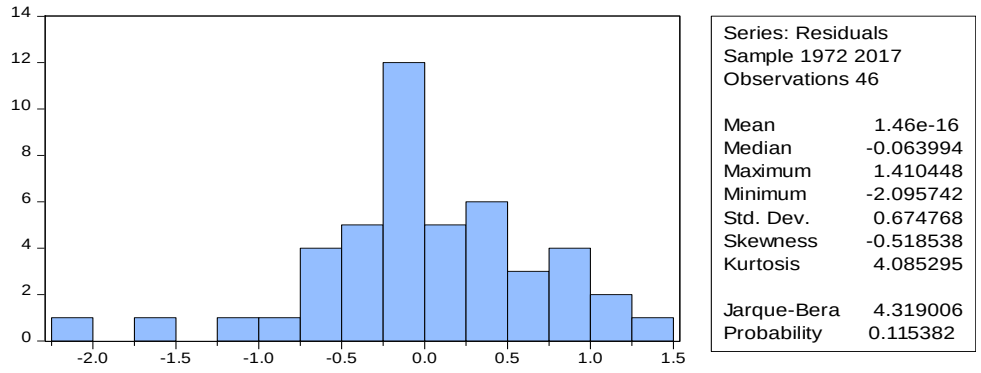
Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.043120	4.065935	NA
INF	0.000114	2.418054	1.044921
ER	0.002500	10.92044	4.841266
NX	0.045487	8.638533	4.919924

Berdasarkan tabel 4.3 terlihat bahwa nilai VIF untuk variabel INF sejumlah 1.044921, nilai VIF untuk variabel ER sejumlah 4.841266 dan nilai VIF untuk variabel BT sejumlah 4.919924. Nilai VIF tidak ada yang bernilai diatas 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model regresi.

4.2.2. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Terdapat dua cara mendeteksi apakah residual memiliki distribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan menggunakan uji statistik Jarque-Bera (JB). Nilai Jarque Bera (JB) dibandingkan dengan nilai Chi-Square Tabel. Jika nilai JB lebih kecil dari nilai Chi Square maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian terdistribusi normal. Hasil uji statistik Jarque-Bera (JB) sebagai berikut :

Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas



Dari gambar diatas diketahui bahwa nilai JB sebesar 4,319006. Nilai *Chi Square* dengan melihat jumlah variabel independen yang dipakai yaitu 2 variabel independen dan nilai signifikan yang dipakai sebesar 0,05 atau 5% diperoleh sebesar 5,99156. Dapat dilihat bahwa nilai JB lebih kecil dari nilai Chi Square (4,319006 < 5,99156) sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal. Nilai probabilitas JB diperoleh sebesar 0,115382, lebih besar dari taraf kepercayaan sebesar 0,05 (0,115382 > 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

4.2.3. Uji Heteroskesdastisitas

Uji heteroskesdastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap (homoskedastisitas) atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada dua cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu metode grafik dan metode uji statistik. Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas dilakukan menggunajan uji Glejser. Jika nilai p value lebih besar daripada nilai signifikansi yang dipakai yaitu 0,05 maka dapat dinyatakan model regresi bersifat homoskedastisitas atau dengan kata lain tidak ada masalah heteroskedastisitas. Hasil uji Glejser sebagai berikut :

Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskesdastisitas

F-statistic	0.283582	Prob. F(3,42)	0.8370
Obs*R-squared	0.913269	Prob. Chi-Square(3)	0.8222
Scaled explained SS	1.004975	Prob. Chi-Square(3)	0.8000

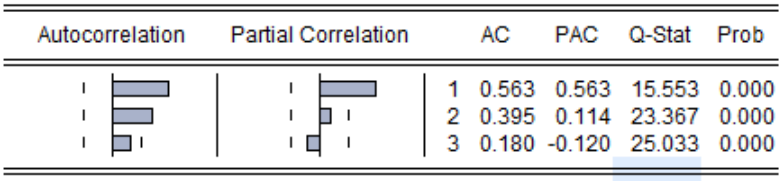
Dalam gambar diatas, nilai p value yang ditunjukkan dengan nilai Prob.chi square(3) pada Obs*R-Squared yaitu sebesar 0,8222. Oleh karena nilai p value lebih besar daripada nilai signifikansi yang dipakai yaitu 0,05 (0,8222 > 0,05) maka dapat dinyatakan model regresi bersifat homoskedastisitas atau dengan kata lain tidak ada masalah heteroskedastisitas.

4.2.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan terhadap korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan

dengan pengamatan lain pada model regresi. Untuk menguji autokorelasi digunakan uji residual dengan melihat *correlogram* dari *Q-stat* pada model. Dalam penelitian ini banyaknya lag yang digunakan sejumlah 3 lag. Jika terdapat p-value yang signifikan (lebih kecil dari) pada tingkat 5% dari ke 3 lag tersebut, maka dalam pemodelan tersebut masih terdapat autokorelasi.

Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi



Autocorrelation	Partial Correlation		AC	PAC	Q-Stat	Prob
		1	0.563	0.563	15.553	0.000
		2	0.395	0.114	23.367	0.000
		3	0.180	-0.120	25.033	0.000

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa nilai Prob (p-value) lebih kecil dari 0,05 sehingga dalam model tersebut masih terjadi autokorelasi.

Penelitian ini menggunakan metode koreksi autokorelasi *Newey-West* untuk mengatasi masalah autokorelasi tersebut. Dengan metode ini, dilakukan koreksi standard error untuk mengatasi masalah autokorelasi. Metode ini mampu mengoreksi masalah autokorelasi dan heteroskedastisitas sekaligus. Hasil koreksi standard error dengan metode *Newey West* bisa juga digunakan sebagai hasil penelitian. Standard error yang telah dikoreksi disebut sebagai HAC (*heteroscedasticity and autocollelation – consistent*) *standard errors* atau *Newey-West standard errors*.

4.3. Hasil Pengujian Hipotesis

Regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel dependennya adalah penerimaan pajak, sedangkan variabel independennya adalah

inflasi, nilai tukar dan neraca perdagangan. Model estimasi yang digunakan untuk membentuk persamaan regresi adalah metode ordinary least square (OLS) dengan persamaan :

$$Log(PP)_t = a + b_1INF_t + b_2ER_t + b_3\ Log(NX)_t + e$$

Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Berganda

Dependent Variable: LOG(PP)
Method: Least Squares
Sample: 1972 2017
Included observations: 46
HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth = 4.0000)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.585810	0.256934	10.06410	0.0000
INF	-0.039592	0.008794	-4.502418	0.0001
ER	0.220446	0.048720	4.524771	0.0000
NX	0.922357	0.274462	3.360600	0.0017

R-squared	0.903367	Mean dependent var	4.116576
Adjusted R-squared	0.896464	S.D. dependent var	2.170655
S.E. of regression	0.698451	Akaike info criterion	2.203037
Sum squared resid	20.48901	Schwarz criterion	2.362049
Log likelihood	-46.66985	Hannan-Quinn criter.	2.262604
F-statistic	130.8776	Durbin-Watson stat	0.659085
Prob(F-statistic)	0.000000	Wald F-statistic	83.83272
Prob(Wald F-statistic)	0.000000		

Tabel 4.7 adalah hasil uji regresi berganda setelah dilakukan koreksi standard error dengan metode Newey West yang akan dipakai sebagai hasil dalam penelitian ini. Ketiga variabel independen yang dimasukkan dalam model ternyata semuanya signifikan, hal ini terlihat dari probabilitas signifikansi ketiganya yang berada dibawah 0.05. Variabel inflasi memiliki nilai t_{hitung} sebesar |-4.502418| lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2.01808 dan nilai signifikansi sebesar 0,0001 lebih kecil dari α=5%. Hal ini menunjukan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap

penerimaan pajak, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak dapat diterima.

Variabel nilai tukar memiliki nilai t_{hitung} sebesar |4.524771| lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2.01808 dan nilai signifikansi sebesar 0,0000 lebih kecil dari α=5%. Hal ini menunjukan bahwa nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa nilai tukar berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak dapat diterima.

Variabel neraca perdagangan memiliki nilai t_{hitung} sebesar |3.360600| lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2.01808 dan nilai signifikansi sebesar 0,0017 lebih kecil dari α=5%. Hal ini menunjukan bahwa neraca perdagangan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa neraca perdagangan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak dapat diterima.

Berdasarkan tabel 4.7 maka persamaan regresi linear berganda dapat didefinisikan sebagai berikut :

$$PP = 2{,}58 - 0{,}03\ INF + 0{,}22\ ER + 0{,}92\ NX + e$$

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Konstanta sebesar 2,58 artinya jika ukuran inflasi, nilai tukar dan neraca perdagangan nilainya adalah 0, maka nilai penerimaan pajak sebesar 2,58.
b. Koefisien regresi dari inflasi sebesar -0,03 artinya jika nilai inflasi mengalami kenaikan sebesar satu satuan dan nilai variabel independen lainnya tetap, maka nilai penerimaan pajak akan mengalami penurunan sebesar 0,03. Koefisien inflasi bernilai negatif yang artinya terjadi hubungan yang negatif

sehingga semakin besar ukuran inflasi maka semakin menurun penerimaan pajak dan sebaliknya.

c. Koefisien regresi dari nilai tukar sebesar 0,22 artinya jika nilai tukar mengalami kenaikan sebesar satu satuan dan nilai variabel independen lainnya tetap, maka nilai penerimaan pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,22. Koefisien nilai tukar bernilai positif yang artinya terjadi hubungan yang positif sehingga semakin besar ukuran nilai tukar maka semakin meningkat penerimaan pajak dan sebaliknya.

d. Koefisien regresi dari neraca perdagangan sebesar 0,92 artinya jika neraca perdagangan mengalami kenaikan sebesar satu satuan dan nilai variabel independen lainnya tetap, maka nilai penerimaan pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,92. Koefisien neraca perdagangan bernilai positif yang artinya terjadi hubungan yang positif sehingga semakin besar neraca perdagangan maka semakin meningkat penerimaan pajak dan sebaliknya.

Pengujian signifikansi simultan (Uji Statistik F) dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Berdasarkan tabel 4.7 diperoleh nilai F hitung (F-statistic) sebesar 130.8776 dengan probabilitas (Prob(F-statistic)) sebesar 0.0000. Oleh karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen (inflasi, nilai tukar dan neraca perdagangan) secara simultan berengaruh signifikan terhadap variabel dependen (penerimaan pajak).

Pengujian koefisien determinasi pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat.

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa besarnya Adjusted R-squared variabel penerimaan pajak sebesar 0.8964 atau 89%. Hal ini menunjukan bahwa variabel penerimaan pajak dapat dijelaskan oleh variasi dari tiga variabel independen yaitu inflasi, nilai tukar dan neraca perdagangan sebesar 89%. Sedangkan sisanya (100% - 89% = 11%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain yang berada di luar model yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.4. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disampaikan analisis hasil penelitian sebagai berikut :

4.4.1. Pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak

Hasil penelitian pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0,0001. Koefisien regresi dari inflasi bernilai negatif yang artinya terjadi hubungan yang negatif. Sehingga dapat diartikan bahwa semakin besar nilai inflasi maka semakin menurun penerimaan pajak dan sebaliknya. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang disusun berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Penelitian Karran (1985), Sookram dan Saridakis (2009), Muibi dan Sinbo (2013), Babyenda dan Klege (2014), menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak.

Salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengukur perekonomian suatu negara adalah inflasi. Perubahan dalam indikator ini akan

berdampak terhadap perekonomian suatu negara, khususnya penerimaan pajak. Inflasi adalah suatu gejala di mana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus menerus. Dampak kenaikan harga akan mempengaruhi produsen dan konsumen. Dari sisi produsen, hasil produksi akan menurun jika terjadi inflasi. Inflasi akan menyebabkan naiknya harga bahan baku. Jika harga bahan baku mengalami kenaikan maka jumlah bahan baku yang bisa diperoleh untuk proses produksi menjadi berkurang sehingga volume barang/jasa yang dihasilkan juga akan menurun. Terjadinya inflasi juga mengakibatkan hasil penjualan akan menurun. Naiknya harga bahan baku menyebabkan naiknya harga jual bahan jadi. Harga jual yang terlalu tinggi menyebabkan masyarakat tidak tertarik untuk membeli barang/jasa tersebut sehingga pada akhirnya akan menurunkan penjualan. Inflasi menyebabkan naiknya biaya produksi dan turunnya penjualan sehingga mengakibatkan menurunnya penghasilan produsen yang menjadi dasar pengenaan pajak. Terjadinya inflasi juga akan mengakibatkan menurunnya transaksi perekonomian yang pada akhirnya menyebabkan menurunnya penerimaan pajak.

Pada masa inflasi terjadi, para pemilik modal atau investor lebih suka menanamkan modalnya dalam bentuk pembelian harta-harta tetap seperti tanah dan rumah serta benda-benda berharga lain seperti emas dan mutiara. Pada masa inflasi nilai barang akan terus naik atau semakin mahal, sedangkan nilai uang atau daya beli uang akan semakin turun. Oleh karena itu, pada masa inflasi para pemilik modal akan berusaha menyelamatkan uang mereka dengan cara membeli harta-harta tetap dan benda-benda berharga lainnya. Hal tersebut menjadikan transaksi

perekonomian cenderung menurun sehingga penghasilan masyarakat cenderung menurun. Pada akhirnya akan berakibat pada turunnya penerimaan pajak.

Jika di dalam negeri terjadi inflasi, harga produk dalam negeri akan lebih mahal dibandingkan produk dari luar negeri. Keadaan ini akan menyebabkan produk domestik akan lebih sulit bersaing dengan produk-produk impor. Akibatnya, nilai ekspor berkurang sehingga penghasilan eksportir sebagai dasar pengenaan pajak juga berkurang. Pada akhirnya akan menurunkan pemerimaan pajak.

4.4.2. Pengaruh nilai tukar terhadap penerimaan pajak

Hasil penelitian pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai tukar berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0,0000. Koefisien regresi dari nilai tukar bernilai positif yang artinya terjadi hubungan yang positif, sehingga dapat diartikan bahwa semakin menguat nilai tukar maka semakin meningkat penerimaan pajak dan sebaliknya. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang disusun berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa nilai tukar berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Penelitian yang dilakukan Basirat, Aboodi, dan Ahangari (2014) menunjukkan bahwa nilai tukar perpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Nilai tukar merupakan jumlah uang domestik yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Ketika nilai tukar melemah, sektor industri yang bergantung kepada impor bahan baku dan barang modal akan mengalami pengurangan hasil produksi dikarenakan mahalnya biaya produksi. Pengurangan hasil produksi akan menyebabkan menurunnya penjualan sehingga akan

mengurangi penghasilan yang menjadi dasar pengenaan pajak. Hal tersebut menyebabkan penerimaan pajak akan mengalami penurunan. Melemahnya nilai tukar yang menyebabkan naiknya biaya produksi akan direspon pengusaha dengan menaikkan harga. Naiknya harga jual produk yang sebanding dengan melemahnya nilai tukar tidak membawa keuntungan berarti bagi pengusaha. Jika penjualan mengalami stagnan maka akan mengurangi penghasilan sehingga penerimaan pajak akan menurun. Ketika nilai tukar mengalami depresiasi maka harga barang dalam negeri cenderung meningkat dan akan mempengaruhi konsumsi masyarakat. Harga jual yang meningkat menyebabkan masyarakat tidak tertarik untuk membeli barang/jasa tersebut sehingga pada akhirnya akan menurunkan penjualan. Keadaan tersebut secara langsung dapat berdampak pada turunnya penerimaan pajak atas penghasilan pengusaha dan pajak atas konsumsi masyarakat.

Akibat lain dari melemahnya nilai tukar adalah beban pembayaran cicilan dan bunga utang luar negeri pemerintah maupun korporasi yang makin besar. Risiko gagal bayar khususnya terhadap utang swasta yang belum dilindung nilai (*hedging*) akan meningkat. Hal tersebut pada akhirnya akan mengurangi penghasilan perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan perusahaan juga akan mengalami penurunan. Indonesia sebagai negara importir minyak mentah sangat sensitif terhadap melemahnya nilai tukar. Melemahnya nilai tukar menyebabkan harga BBM akan pengalami penyesuaian baik yang subsidi maupun non-subsidi. Naiknya harga BBM akan mendorong naiknya harga yang pada akhirnya akan menurunkan penghasilan dan penerimaan pajak. Melemahnya nilai tukar juga mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) pada industri yang selama ini

menggantungkan bahan baku dari impor. Konsekwensi dari meningkatnya harga-harga barang yang tidak diikuti dengan naiknya penghasilan, bahkan penghasilan hilang karena di PHK dan menganggur, maka daya beli masyarakat menurun. Hal tersebut pada akhirnya akan menurunkan penghasilan dan penerimaan pajak.

4.4.3. Pengaruh neraca perdagangan terhadap penerimaan pajak

Hasil penelitian pada tabel 4.7 menunjukan bahwa neraca perdagangan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0,0017. Koefisien regresi dari neraca perdagangan bernilai positif yang menunjukkan terjadinya hubungan yang positif. Sehingga dapat diartikan bahwa semakin besar neraca perdagangan maka semakin meningkat penerimaan pajak dan sebaliknya. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang disusun berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa neraca perdagangan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Handoko, Aimon, dan Sofyan (2014) menyatakan bahwa neraca perdagangan memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap perekonomian di Indonesia yang pada akhirnya akan mempengaruhi penerimaan pajak di Indonesia.

Neraca perdagangan atau neraca ekspor-impor adalah perbedaan antara nilai ekspor dan impor suatu negara pada periode tertentu. Neraca positif artinya terjadi surplus perdagangan yaitu nilai ekspor lebih tinggi dari impor. Sebaliknya, neraca negatif artinya terjadi defisit perdagangan yaitu nilai ekspor lebih rendah dari impor. Neraca perdagangan yang mengalami surplus (positif) mengindikasikan terjadinya peningkatan proses produksi dan penjualan dari pelaku usaha. Terjadinya peningkatan penjualan akan menyebabkan naiknya penghasilan pelaku usaha

sehingga pada akhirnya akan menaikkan penerimaan pajak. Apabila terjadi defisit neraca perdagangan mengindikasikan terjadinya impor yang berlebihan yang akan mengakibatkan penurunan dalam kegiatan ekonomi dalam negeri karena konsumen menggantikan barang dalam negeri dengan barang impor. Hal inilah yang menyebabkan menurunnya penjualan pengusaha dalam negeri sehingga pada akhirnya akan menurunkan penghasilan dan mengakibatkan penurunan penerimaan pajak. Neraca perdagangan yang mengalami surplus mengindikasikan besarnya permintaan terhadap barang dan jasa buatan dalam negeri daripada barang dan jasa dari luar negeri. Hal tersebut mendorong pengusaha untuk meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa sehingga pada akhirnya penghasilan pengusaha akan mengalami peningkatan. Dengan penghasilan yang meningkat akan mengakibatkan naiknya penerimaan pajak.

Dalam penelitian ini, variabel PDB dan belanja negara dikeluarkan dari model persamaan regresi dikarenakan terjadi multikolinearitas dalam variabel bebas. Terjadinya multikolinearitas menyebabkan kesalahan standar (*standar error*) yang besar, yang akan mengakibatkan koefisien regresi tidak dapat ditaksir dengan ketepatan yang tinggi. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu dapat dijelaskan bahwa PDB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Perubahan PDB mengindikasikan perubahan dalam pendapatan yang diterima masyarakat dan tingkat konsumsi masyarakat. Semakin tinggi pendapatan masyarakat menyebabkan penerimaan pajak akan bertambah. Penelitian yang dilakukan Karran (1985), Ghura (1998), Zhang dan Cui (2008), Sookram dan Saridakis (2009), Sinaga (2010), Yuksel, Orhan, dan Oztunc (2013), Muibi dan Sinbo (2013),

Wijayanti (2015), dan Mossie (2016) menunjukkan terdapat pengaruh dan hubungan positif antara tingkat pendapatan dan penerimaan pajak.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu juga dapat dijelaskan bahwa Belanja Negara berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Anggaran dari pemerintah diharapkan akan menciptakan *multiplier effect* dalam perekonomian yang akan menaikkan penghasilan masyarakat dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian yang dilakukan Aggrey (2011) dan Taha dan Loganathan (2008) menunjukkan bahwa belanja negara mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak. Penelitian yang dilakukan Ghura (1998) menunjukkan bahwa belanja negara perpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel makroekonomi yang berupa PDB, inflasi, nilai tukar, belanja negara dan neraca perdagangan terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Sampel data yang digunakan adalah data runtun waktu (*time series*), data tahun 1972 sampai dengan tahun 2017 dengan data yang diperoleh dari World Bank.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap penerimaan pajak. Koefisien regresi dari inflasi bernilai negatif, yang artinya semakin besar nilai inflasi maka semakin menurun penerimaan pajak dan sebaliknya. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang disusun berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak.
2. Nilai tukar berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Koefisien regresi dari nilai tukar bernilai positif, yang artinya semakin menguat nilai tukar maka semakin meningkat penerimaan pajak dan sebaliknya. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang disusun berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa nilai tukar berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

3. Neraca perdagangan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Koefisien regresi dari neraca perdagangan bernilai positif, yang artinya semakin besar nilai neraca perdagangan maka semakin meningkat penerimaan pajak dan sebaliknya. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang disusun berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa neraca perdagangan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.
4. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa variabel bebas berupa inflasi, nilai tukar Rupiah dan neraca perdagangan mampu menjelaskan variabel penerimaan pajak sebesar 89%. Sedangkan sisanya sebesar 11% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain yang berada di luar model dan tidak diteliti dalam penelitian ini.
5. Dalam penelitian ini, variabel PDB dan belanja negara dikeluarkan dari model persamaan regresi dikarenakan terjadi multikolinearitas dalam variabel bebas. Terjadinya multikolinearitas menyebabkan kesalahan standar (*standar error*) yang besar, yang akan mengakibatkan koefisien regresi tidak dapat ditaksir dengan ketepatan yang tinggi.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan faktor makroekonomi khususnya inflasi, nilai tukar dan neraca perdagangan dalam pengambilan

kebijakan yang terkait dengan penerimaan pajak. Hal tersebut perlu dilakukan agar target penerimaan pajak dapat terpenuhi.

2. Bagi peneliti selanjutnya :

- Diharapkan memperluas variabel terikat (penerimaan pajak) menjadi variabel setiap jenis pajak. Misalnya melakukan analisis pengaruh faktor makroekonomi terhadap Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Untuk variabel bebas agar diperluas dengan menambahkan unsur yang bersifat kualitatif misalnya kemauan dan kejujuran dalam membayar pajak. Hal ini dikarenakan sistem pemungutan pajak yang menggunakan metode *self assestment* memberikan keleluasaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, melapor dan membayar pajaknya. Hal tersebut menuntut kejujuran dan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
- Rentang periode penelitian agar dibagi menjadi per triwulan, kuartal atau semester. Hal tersebut bertujuan agar pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap indikator makroekonomi sesegera mungkin, sehingga bisa diambil kebijakan untuk merespon kondisi makroekonomi yang terjadi demi mengamankan penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

_____.Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000. terakhir dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

_____.Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000. terakhir dengan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

_____.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Aggrey, J. (2011). *Determinants of Tax Revenue: Evidence from Ghana.* University Of Cape Coast.

Ahmed, Q. M., (1994). *The Determinants of Tax Buoyancy: An Experience from the Developing Countries.*The Pakistan Development Review 33:4 Part II (Winter 1994) pp 1089-1098.

Babyenda, P., Klege, R. A., (2014). *East African Community (EAC) and Uganda's Tax Revenue.* Research Journal of Finance and Accounting Vol.5, No.10.

Basirat, M., Aboodi, F., (2014). Ahangari, A., *Analyzing the Effect of Economic Variables on Total Tax Revenues in Iran.* Asian Economic and Financial Review, 4(6): 755-767.

Boediono, (2016). *Ekonomi Makro.* Penerbit BPFE, Yogyakarta.

Fjeldstad, O. (2014). *Tax and Development: Donor Support to Strengthen Tax Systems in Developing Countries*. Journal Public Administration And Development.

Ghura, D. (1998). *Tax Revenue in Sub-Sahara Africa: Effect of Economic Policies and Corruption.* International Monetary Fund Working Paper.

Gupta, A. S., (2007). *Determinants of Tax Revenue Efforts in Developing Countries.* IMF Working Paper WP/07/184 International Monetary Fund.

Hartati, N., (2015). *Pengantar Perpajakan.* Pustaka Setia, Bandung.

Handoko, I., Aimon, H., Sofyan, E., (2014). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perekonomian dan Penerimaan Pajak di Indonesia*. Jurnal Kajian Ekonomi.

Karran, T. (1985). *Determinants of Taxation in Britian: An Empirical Test*. Journal of Public Policy, 5(3), 365-386.

Kementerian Keuangan, (2017). *Rangkuman Eksekutif Kajian Pengembangan Model Proyeksi Penerimaan Perpajakan*. http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/dw-konten-view.asp?id=20170616144831475559543, diakses pada 25 Januari 2017.

Latif, Y. (2014). *Mata Air Keteladanan: Pancasila Dalam Perbuatan*. Jakarta: Penerbit Mizan.

Mankiw, N.G., (2013). *Macroeconomics*. Worth Publisher, New York.

Mardiasmo, (2016). *Perpajakan.* Penerbit ANDI, Yogyakarta.

Mossie, W. A., (2016). *Determinants of Tax Revenue in Ethiopia (Johansen Co-Integration Approach).* International Journal of Business, Economic and Management 3(6):69-84.

Muibi, S. O., Olatunbosun, O. S. (2013). *Macoreconomic Determinants of Tax Revenue in Nigeria (1970-2011).* World Applied Sciences Journal, 28(1), 27-35. 10.5829/idosi.wasj.2013.28.01.1189.

Richard, Toly, A. A., (2013). *Analisa Korelasi Inflasi, Economic Growth, Economic Structure, dan Tax Rate Terhadap Tax Revenue Di Negara-Negara Asean.* Tax & Accounting Review, Vol. 3, No.2.

Samryn, L. M., Mujtahid, (2008). *Pengaruh Tingkat Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Penerimaan Pajak.* Jurnal Ilmiah Penelitian Manajemen Manajerial Vol. 6 No. 1

Sinaga, A. R., (2010). *Pengaruh Variabel – Variabel Makro Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Di Indonesia*. Fakultas Ekonomi Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik Jakarta.

Sookram, S., Saridakis, G., (2009). *The Effect of Economic Factors on the Tax Ratio in Trinidad and Tobago.* The Journal of Developing Areas, Volume 42, Number 2, pp. 111-128.

Sukirno, S., (2015). *Makroekonomi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Taha, R., Loganathan, N., (2008). *Causality Between Tax Revenue and Government Spending In Malaysia*. The International Journal of Business and Finance Research ,Volume 2, Number 2.

Tanzi, V. (1989). *The Impact of Macroeconomic Policies on the Level of Taxation and the Fiscal Balance in Developing Countries*. Staff Paper – International Monetary Fund.

Tim Edukasi Perpajakan, (2016). *Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi.* Kementerian Keuangan, Jakarta

Wijayanti, W. K., Budi N, Y. A. B., (2010). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Total Penerimaan Pajak Negara dan Efektifitas Peraturan Perpajakan.* Media Ekonomi Vol. 18 No. 1.

Wijayanti, A., Firmansyah (2015). *Analysis of Indonesian Tax Revenue.* Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Yuksel, H., Orhan, M., Oztunc, H., (2013). *Tax Revenue and Main Macroeconomic Indicators in Turkey*. European Journal of Economic and Political Studies

Zhang, M. Y., Cui, J. C., (2008). *A Cointegration Analysis of the Relationships among Tax Revenue and Macroeconomic Factors in China*. The 7th International Symposium on Operations Research and Its Applications (ISORA'08) Lijiang, China, October 31–Novemver 3, 2008

LAMPIRAN

Data Penerimaan Pajak

Tahun	Penerimaan Pajak	Tahun	Penerimaan Pajak
1972	568,000,000,000	1995	68,017,000,000,000
1973	933,000,000,000	1996	75,810,000,000,000
1974	1,710,000,000,000	1997	100,505,700,000,000
1975	2,093,000,000,000	1998	143,626,700,000,000
1976	2,767,000,000,000	1999	179,430,400,000,000
1977	3,369,000,000,000	2000	115,913,000,000,000
1978	4,070,000,000,000	2001	190,614,200,000,000
1979	6,496,000,000,000	2002	215,467,500,000,000
1980	9,898,000,000,000	2003	249,404,313,253,852
1981	11,857,000,000,000	2004	283,093,000,000,000
1982	11,960,000,000,000	2005	347,031,000,000,000
1983	13,872,000,000,000	2006	409,203,000,000,000
1984	15,221,000,000,000	2007	490,988,000,000,000
1985	17,761,000,000,000	2008	658,701,000,000,000
1986	14,993,000,000,000	2009	619,922,000,000,000
1987	18,827,000,000,000	2010	723,307,000,000,000
1988	21,435,000,000,000	2011	873,874,000,000,000
1989	26,678,000,000,000	2012	980,518,000,000,000
1990	37,431,600,000,000	2013	1,077,310,000,000,000
1991	39,098,000,000,000	2014	1,145,282,928,434,310
1992	44,499,900,000,000	2015	1,239,482,788,808,500
1993	47,344,000,000,000	2016	1,281,885,902,999,960
1994	60,958,000,000,000	2017	1,495,894,000,000,000

Data Produk Domestik Bruto

Tahun	Produk Domestik Bruto
1972	4,859,411,066,725
1973	7,190,522,939,970
1974	11,401,089,768,295
1975	13,460,802,894,627
1976	16,467,803,055,592
1977	20,241,193,244,127
1978	24,218,265,583,641
1979	34,098,287,286,659
1980	48,387,234,337,223
1981	57,523,970,574,491
1982	63,492,400,608,592
1983	78,467,776,737,753
1984	92,689,539,555,559
1985	100,851,731,763,604
1986	109,183,321,934,119
1987	132,895,842,500,956
1988	151,302,725,187,293
1989	178,005,955,601,923
1990	208,257,493,054,450
1991	242,172,221,518,168
1992	276,705,875,409,818
1993	351,120,984,237,125
1994	406,959,386,525,084

Tahun	Produk Domestik Bruto
1995	483,933,139,246,880
1996	567,039,183,388,221
1997	668,324,258,776,750
1998	1,017,615,936,669,940
1999	1,170,913,213,730,870
2000	1,479,724,634,588,500
2001	1,752,882,415,905,690
2002	1,939,754,028,415,880
2003	2,144,012,409,295,340
2004	2,444,426,652,839,230
2005	2,953,850,192,714,120
2006	3,555,352,119,219,010
2007	4,206,620,100,685,870
2008	5,268,998,943,193,660
2009	5,969,072,489,981,120
2010	6,864,133,100,000,000
2011	7,831,726,000,000,000
2012	8,615,704,500,000,000
2013	9,546,134,000,000,000
2014	10,569,705,300,000,000
2015	11,531,716,900,000,000
2016	12,406,809,800,000,000
2017	13,588,800,000,000,000

Data Inflasi

Tahun	Inflasi
1972	6.51
1973	31.04
1974	40.60
1975	19.05
1976	19.86
1977	11.04
1978	8.11
1979	16.26
1980	18.02
1981	12.24
1982	9.48
1983	11.79
1984	10.46
1985	4.73
1986	5.83
1987	9.28
1988	8.04
1989	6.42
1990	7.81
1991	9.42
1992	7.53
1993	9.69
1994	8.52

Tahun	Inflasi
1995	9.43
1996	7.97
1997	6.23
1998	58.39
1999	20.49
2000	3.72
2001	11.50
2002	11.88
2003	6.59
2004	6.24
2005	10.45
2006	13.11
2007	6.41
2008	9.78
2009	4.81
2010	5.13
2011	5.36
2012	4.28
2013	6.41
2014	6.39
2015	6.36
2016	3.53
2017	3.81

Data Nilai Tukar

Tahun	Nilai Tukar
1972	415.00
1973	415.00
1974	415.00
1975	415.00
1976	415.00
1977	415.00
1978	442.05
1979	623.06
1980	626.99
1981	631.76
1982	661.42
1983	909.26
1984	1,025.94
1985	1,110.58
1986	1,282.56
1987	1,643.85
1988	1,685.70
1989	1,770.06
1990	1,842.81
1991	1,950.32
1992	2,029.92
1993	2,087.10
1994	2,160.75

Tahun	Nilai Tukar
1995	2,248.61
1996	2,342.30
1997	2,909.38
1998	10,013.62
1999	7,855.15
2000	8,421.78
2001	10,260.85
2002	9,311.19
2003	8,577.13
2004	8,938.85
2005	9,704.74
2006	9,159.32
2007	9,141.00
2008	9,698.96
2009	10,389.94
2010	9,090.43
2011	8,770.43
2012	9,386.63
2013	10,461.24
2014	11,865.21
2015	13,389.41
2016	13,308.33
2017	13,384.13

Data Belanja Negara

Tahun	Belanja Negara	Tahun	Belanja Negara
1972	414,000,000,000	1995	35,584,200,000,000
1973	716,000,000,000	1996	40,299,200,000,000
1974	841,000,000,000	1997	42,952,000,000,000
1975	1,253,700,000,000	1998	54,415,900,000,000
1976	1,590,500,000,000	1999	72,631,300,000,000
1977	2,077,300,000,000	2000	90,779,700,000,000
1978	2,658,900,000,000	2001	113,416,100,000,000
1979	3,733,400,000,000	2002	132,218,800,000,000
1980	4,688,200,000,000	2003	163,701,400,000,000
1981	5,787,900,000,000	2004	191,055,630,000,000
1982	6,831,700,000,000	2005	224,980,540,000,000
1983	8,077,300,000,000	2006	288,079,870,000,000
1984	9,121,500,000,000	2007	329,760,103,000,000
1985	10,893,100,000,000	2008	416,866,669,000,000
1986	11,328,700,000,000	2009	537,588,830,000,000
1987	11,765,500,000,000	2010	618,177,992,000,000
1988	12,755,800,000,000	2011	709,450,776,000,000
1989	15,697,600,000,000	2012	796,848,275,918,400
1990	17,572,600,000,000	2013	908,574,301,386,400
1991	20,784,600,000,000	2014	996,197,442,903,800
1992	24,731,300,000,000	2015	1,124,812,063,928,100
1993	29,756,700,000,000	2016	1,172,420,339,035,300
1994	31,014,000,000,000	2017	1,259,600,000,000,000

Data Neraca Perdagangan

Tahun	Neraca Perdagangan	Tahun	Neraca Perdagangan
1972	-108,600,000,000	1995	-6,064,400,000,000
1973	38,700,000,000	1996	-3,278,700,000,000
1974	811,400,000,000	1997	-1,728,500,000,000
1975	72,600,000,000	1998	93,186,700,000,000
1976	207,500,000,000	1999	88,906,100,000,000
1977	648,600,000,000	2000	146,172,399,000,000
1978	231,900,000,000	2001	136,168,456,000,000
1979	2,074,000,000,000	2002	114,698,623,000,000
1980	3,769,400,000,000	2003	147,779,870,000,000
1981	1,125,700,000,000	2004	107,263,167,320,000
1982	-2,336,500,000,000	2005	115,038,323,090,000
1983	-787,400,000,000	2006	180,728,625,000,000
1984	4,357,700,000,000	2007	159,702,491,000,000
1985	1,833,600,000,000	2008	52,217,011,198,700
1986	-1,026,300,000,000	2009	157,316,680,000,000
1987	1,918,500,000,000	2010	130,198,052,766,900
1988	3,494,200,000,000	2011	193,811,174,604,400
1989	3,904,000,000,000	2012	-33,958,000,000,000
1990	1,007,400,000,000	2013	-75,435,452,130,300
1991	888,100,000,000	2014	-79,083,210,633,100
1992	6,047,800,000,000	2015	49,474,165,886,200
1993	9,847,900,000,000	2016	96,153,919,019,000
1994	4,379,300,000,000	2017	158,268,675,663,000